JURNAL STATES

AKSARA AGAR BERDAYA

Multikeaksaraan untuk Kesejahteraan

Volume V Edisi 2/Juni/20



Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Hamid Muhammad, Ph.D

Editor: Dr. Wartanto

Pimpinan Redaksi: Dra. Ida M Kosasih, M.Pd.

Tim Redaksi dan Pengolahan Naskah:

Drs. Toto Argo Nugroho Dra. M. Katarina, M.Pd. Mohammad Alipi, S.Pd. Dr. Suryadi Nomi Cecep Somantri, S.S.



Penulis Artikel:

A. Ismail Lukman Entoh Tohani Sumarno Yoyon Suryono Yudan Hermawan

Bambang Sutrisno

Sekretariat:

Johan Winarni, M.Pd. Erna Fitriawati NH, SE. Surya Nilasari, S.Pd. Hamzah Hakim, M.Pd.

Desain/Layout:

Surya Evendi, S.Dg Mareta Puspita, S.Pd.

Alamat Redaksi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta (10270) Telepon: (021) 5725715, 5725575 Fax: (021) 5725039 email: jardikmas@gmail.com

Dipublikasikan Oleh:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Daftar Isi	1
Pengantar Redaksi	2
TEMA KITA	
Pendidikan Keaksaraan, Modal Sosial dan Masyarakat Bermartabat	
DR. Wartanto	3
ARTIKEL	
Model Pembelajaran Keaksaraan Menggunakan Media "Lagu Aksara" A. Ismail Lukman	5
Modal Sosial dalam Penyelenggaraan Pendidikan Literasi Menuju	
Masyarakat yang Sejahtera Entoh Tohani	9
Peran Pendidikan <i>Literacy Ganda</i> Dalam Pembentukan Masyarakat Bermartabat Sumarno	18
Pendidikan Multi Keaksaraan: Urgensi dan Substansi Yoyon Suryono	28
Keaksaraan Berbasis Potensi Lokal Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Yudan Hermawan	32

Jurnal AKRAB ini dipublikasikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pandangan dari kontributor dalam jurnal ini mencerminkan berbagai persfektif mengenai pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan. Berbagi pandangan ini tidak harus mencerminkan pandangan editor.

Modal Sosial dalam Penyelenggaraan Pendidikan Literasi Menuju Masyarakat yang Sejahtera

Entoh Tohani Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Modal sosial sebagai suatu potensi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikelola dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan literasi sebagai suatu wujud usaha edukatif guna mengembangkan warga masyarakat menjadi bermartabat dan sejahtera memerlukan modal sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan literasi terjadi melalui dan dalam hubungan para pelaku atau aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Hubungan antar pelaku yang positif menjamin keefektivan pendidikan literasi.

Kata kunci: modal sosial, literasi, pendidikan, bermartabat

PENDAHULUAN

Pendidikan literasi dimaknai sebagai suatu upaya yang memungkinkan setiap warga masyarakat menjadi individu yang mampu memahami berbagai realitas yang terjadi dalam kehidupannya baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Melalui pendidikan literasi memungkinkan setiap warga masyarakat dan lingkungannya menjadi masyarakat yang memiliki nilai positif, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan yang relevan

dengan kemajuan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan literasi menjadi suatu modal untuk memajukan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat kemampun literasi yang baik seperti bangsa Jepang, Finlandia, Amerika Serikat mampu memjadi masyarakat yang lebih makmur dan bahkan menguasai bidang ekomoni global. Sebaliknya, masyarakat yang kemampuan literasinya rendah, sebagaimana yang terjadi umumnya dalam negara-negara miskin, akan sulit mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur.

Di Indonesia, keberadaan pendidikan literasi dipandang menjadi salah solusi terkait dengan permasalahan rendahnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan yang ada di masyarakat. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat menikmati layanan pendidikan optimal sesuai dengan kebutuhannya. Realita menunjukkan masih terdapat kelompok masyarakat yang masih memerlukan layanan pendidikan yang ditandai dengan adanya warga masyarakat yang masih buta huruf (calistung) dimana tahu 2013 sekitar 4,03 persen dari seluruh penduduk 15 tahun ke atas (www.kemendikbud.go.id). Begitu pun, indeks IPM Indonesia menunjukkan sebagai salah

satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu bangsa dari aspek angka harapan hidulp, lama pendidikan sekolah, dan pendapatan perkapita, dimana HDI Indonesia pada tahun 2014 berada dalam peringkat 108 dari 187 negara dengan nilai 0,684, termasuk kelompok pembangunan yang sedang. Hal ini menunjukkan pendidikan perlu diberikan prioritas dalam rangka mengembangkan masyarakat.

pendidikan literasi Penyelenggaraan untuk terobosan-terobosan memerlukan diharapkan yaitu memberikan hasil yang masyarakat bermartabat dan sejahtera cepat tercapai. Namun, keinginan ini nampaknya masih belum terwujud. Penyelenggaraan pendidikan literasi masih ditekankan pada pengembangan literasi sempit yang diwujudkan dalam bentuk program pemberantasan buta calistung. Walau pun kemampuan dasar ini diperlukan dan menjadi dasar, namun dipandang tidak cukup untuk dapat mengembangkan masyarakat yang berkualitas secara holistik. Dilihat dari aspek manajemen, penyelenggaraan pendidikan literasi terlihat masih dipandang sebagai suatu tindakan pendidikan yang hanya dibebankan kepada instansi pendidikan semata misalnya lembaga pendidikan formal atau nonformal sebagai pelaku pokok dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun yang sedang digalakkan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan pengembangan pendidikan literasi yang melibatkan berbagai instansi masih belum terwujud sehingga masyarakat yang literate akan lama terwujud. Hal lain adalah pendidikan literasi cenderung dimaknai sebagai kegiatan pendidikan untuk mereka yang kruang beruntung atau marginal.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang sejahtera dan bermartabat, idealnya, pendidikan literasi diselenggarakan mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan diselenggarakan dengan didasarkan pada potensi yang ada di masyarakat yang bersumber dari hubungan yang baik di antara individu, kelompok maupun masyarakat. Potensi ini disebut sebagai

modal sosial yang perlu dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan kualitas warga masyarakat dan pendidikan. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kegunaan dapat mempermudah sosial yang modal perwujudkan warga masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.

PANDANGAN SOSIOKULTUR TENTANG PENDIDIKAN LITERASI

Pendidikan literasi pada dasarnya dimaknai sebagai tindakan edukatif yang dilakukan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya guna mencapai kehidupan yang bermartabat dan lebih baik. Pendidikan literasi pada dasarnya merupakan proses interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan yang kondisiif untuk menanamkan nilai-nilai positif, pengetahuan, dan keterampilan agar peserta didik menjadi individu yang literate atau terdidik. Proses pendidikan literasi diselenggarakan sedemikian rupa misalnya melalui pembelajaran, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan sehingga memungkinkan warga belajar dapat mencapai perkembangan moral, psikologis, fisik, dan intelektual secara optimal. Pendidikan literasi bukan merupakan kegiatan edukatif yang hanya mengembangkan literasi sebagai akhir dari proses... pendidikan, namun menjadi alat bagi individu untuk mencapai kesejahteraan hidup baik spiritual, sosial, dan material.

Pendidikan literasi yang dilakukan terhadap individu maupun masyarakat khususnya dalam konteks masyarakat sekarang ini disebabkan oleh bebepara alasan. Wenger (Sumarno, 2009, p.:3) menyatakan bahwa literasi perlu dikuasai karena alasan ekonomi, sosial dan politik dimana program literasi dalam bidang ekonomi menjadi prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi; lliterasi mampu meningkatkan kesehatan dan menurunkan angkat kematian bayi, dan program literasi menjadi alat untuk menumbuhkan solidaritas nasional. Hal yang hampir ini senada disampaikan Lind (2007, p.37) bahwa kebutuhan akan pendidikan literasi disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin maju yang menghasilkan kebutuhan dan permintaan, kehidupan yang tidak stabil dan perubahan dalam relasi gender, dan menjamurnya HIV dan penyakit-penyakit menular.

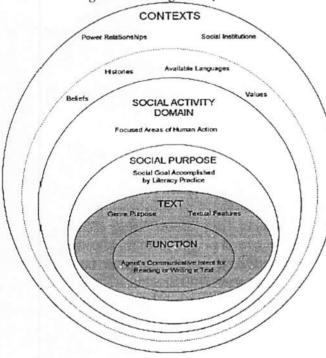
Setiap masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan literasi tentu memiliki tujuan yang disesuaikan dengan falsafah pendidikan yang dianutnya. Tujuan pendidikan literasi dirumuskan tidak sama pada masing-masing masyarakat. Pendidikan literasi, khususnya yang diperuntukkan bagi orang dewasa, sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal yang ditujukan untuk: (a) pengembangan intelektual kesadaran masyarakat, (b) mengkatualisasikan diri individu, (c) menciptakan individu yang berkualitas dan masyarakat yang baik, (d) mendukung terjadinya transformasi sosial yang positif, dan (e) meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi (Foley, 2000, p.35). Sebagai contoh, pembelajaran literasi yang berupaya memberdayakan kaum perempum dimaksud untuk membantu kaum perempuan untuk mengetahui informasi, menguatkan pola interaksi sosial, dan membentuk perilaku untuk emansipasi (Daniel, 2000).

Dalam perkembangan pendidikan literasi, makna literasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. UNESCO () menyatakan bahwa pemahaman terhadap konsep literasi sendiri dibagi dalam delapan periode: (a) era 1945-1964 menekankan pada kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Ibu (mother tounge), (b) era 1965-1973 muncul konsep literasi fungsional berorientasi pekerjaan, (c) 1974-1980 menekankan pada literasi sebagai alat untuk kebebasan misal gerakan kebebasan yang dipelopori oleh Paulo Freire, (d) era tahun 1980-an yang ditandai dengan kampanye massal untuk penghapusan nirliterasi dan keadilan sosial, (e) era 1990-an adanya penekanan kebutuhan belajar dasar di Jomtien dan keterlibatan pihak swasta/NGO dalam program literasi orang dewasa, dan (f) era 2001 sampai

sekarang sebagaimana di dalam deklarasi Dakar, menekankan kembali mengenai kontradiksi dan ketidakkonsistenan mengenai belajar sepanjang hayat, literasi, dan masyarakat yang literate.

Pendidikan literasi bukan saja dimaknai dari sudut pandang bahasa namun dapat dipahami dari sudut pandang sosiokultur. Dari sudut pandang ilmu bahasa, pendidikan literasi dipahami sebagai usaha edukatif yang menekankan pada bagaimana individu memiliki dan mencapai kemampuan belajar menulis, menghitung, dan membaca. Pendidikan literasi menggunakan beragam teks tertulis sebagai salah satu aspek kajian pendidikan. Berbeda halnya dengan sudut pandang sosiokultural, pendidikan literasi mencakup aspek kajian mengenai literasi sebagai praktik sosial, multiliterasi, dan literasi kritis (Ferry, 2012). Literasi sebagai praktik sosial menekankan bahwa literasi tidak lepas dari pengaruh budaya yang ada di masyarakat karena budaya timbul dalam kehidupan masyarakat. Literasi merupakan apa yang orang-orang lakukan dengan membaca, menulis, dan teks-teks dalam konteks dunia nyata dan mengapa mereka melakukan dengan hal-hal tersebut. Barton & Hamilton (2000) dalam Ferry (2012) menyatakan enam proposisi mengenai karakteristik literasi ini yaitu: (1) Literacy is best understood as a set of social practices; these can be inferred from events, (2) which are mediated by written texts, (3) There are different literacies associated with different domains of life, (4) Literacy practices are patterned by social institutions and power relationships, and some literacies become more dominant, visible and influential than others, (5) Literacy practices are purposeful and embedded in broader social goals and cultural practices, (6) Literacy is historically situated, (7) Literacy practices change, and new ones are frequently acquired through processes of informal learning and sense making.

Pemikiran mengenai literasi sebagai praktik sosial dapat digambarkan di bawah. Jelas sekali bagi, kemampuan berbahasa, menulis dan teks memiliki tujuan dan tidak lepas dari konteks literasi berkembang. Adanya pemikiran ini menggambarkan pengetahuan apa yang dibutuhkan individu dalam literasi sebagai praktik sosial. Pengetahuan dimaksud adalah lexicosyntactic and graphophonic knowledge, cultural knowledge, and written genre knowledge (Perry, 2012)



Gambar 1. Literasi sebagai praktik sosial

Literasi pun dimaknai sebagai multiliterasi. merupakan phenomena timbul karena perubahan dunia. Multiliterasi menekankan dunia nyata dimana orang-orang mempraktikan literasi. Multiliterasi menekankan pada multimodality artinya literasi tidak sebatas pada literasi yang tercetak (teks), namun pada penggunaan beragam media dalam pembentukan makna. Multimodalitas mencakup pembuatan makna terjadi melalui suatu keragaman saluran komunikatif dimana bentuk (modes) linguistik tertulis merupakan bagian dan kemasan dari visual, suara, pola-pola spatial dari makna. Sedangkan literasi kritis menenkankan pada penggunaan bahasa yang dimiliki individu terkait dengan proses pemberdayaan. Kata (the word) yang digunakan memiliki atau representasi dari dunia (the world) yang dimaksudkannya. Literasi kritis sangat erat dengan kegiatan pemberdayaan

sebagaimana gerakan pemberdayaan marginal yang dilakukan Paulo Freire. Literasi merupakan proses penyadaran, literasi memahami kata yang ada, menghubungkannya dengan dunia, dan menjadi alat pemberdayaan.

Hal yang senada dikemukakan UNESCO bahwa about literacy for dults, there are at least three ways of using the term adult literacy, i.e. first, literacy referring to reading, writing and arithmetic skills; second, literacy referring to the process of acquisition of reading and writing skills (text and numbers) within or outside adult literacy learning programmes; and third, literacy referring to the uses of literacy for different purposes. Nampak dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa literasi tidak sebatas pada penguasaan kemampuan calistung semata namun lebih dari itu adalah kemampuan untuk menguasai pengetahuan melalui calistung, dan pemanfaatan pengetahuan dari calistung untuk berbagai kepentingan. Memang disadari bahwa kemampuan calistung menjadi modal awal untuk menguasai berbagai kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, Sumarno (2009, p.13) menunjukkan bahwa literasi mengalami perubahan makna, dimana seiring dengan proses modernisasi yang ditandai dengan pembesaran skala dan tuntutan spesialisasi karena diferensiasi yang semakin luas dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini berkonsekuensi kepada setiap individu atau masyarakat yang mana mereka perlu menguasai literasi yang tidak tunggal, namun multiliterasi yang mencakup: literasi teknologi, literasi finansial dan ekonomi, literasi kesehatan, literasi kewarganegaraan, literasi informasi dan media massa, literasi sosial, dan literasi kritis (critical literacy).

Bahkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Dale 82 Newman (2005)mengemukakan perlunya literasi pembangunan Literasi berkelanjutan. pembangunan berkelanjutan dimakna sebagai:

"Sustainable development literacy includes the more traditional environmental and ecology, and if these literacies are absent some familiarity with them will be needed as a first step in sustainable development education. In addition, one must acquire knowledge of interdisciplinary and transdisciplinary research methods, including both natural and social science ethodology; multiple perspective taking and making; contextual appreciation and analysis, on multiple scales of interaction; and multiple complex systems perspectives that encompasses both the parts and the whole in dynamic interactions (Dale & Newman, 2005).

Pendidikan pembangunan literasi berkelanjutan diperlukan untuk membangun kemampuan individu agar adaptif: kemampuan yang memaknai perubahan lingkungan atau kondisi melalui proses belajar adaptif yang terus menerus dan kemampuan untuk menghasilkan program baru yang berguna. Dua keterampilan terkait dengan literasi ini mencakup keterampialn berbasis fakta (facts based skills) dan keterampilan berbasis proses (processed based skills). Yang pertama mencakup penguasaan terhadap: (a) teori sistem, (b) pengetahuan berdasarkan ilmu ilmu yang terkait/relevan yang pertaining perubahan ekonomi, sosial, dan ekologi, (c) metodelogi penelitian ilmu sosial dan alam. D) kemampuan action reseach, dan (e) governance. Sedangkan kompetensi kedua mencakup kemampuan dalam: (a) berfikir sistem, b) metode penelitian transdisiplin dan interdisiplin, (c) perspective taking dan respectives making, (d) appreciation dan analisis kontekstual, (e) analisis hambatan, (f) membangun skenario dan backcating, (g) proses yang melibatkan multistakeholder, dan (h) artikulasi nilai-nilai.

MODAL SOSIAL DALAM PENDIDIKAN LITERASI

Beragam penyelenggaraan pendidikan literasi yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok sasaran (target groups) misalnya pendidikan literasi untuk orang migran, pendidikan literasi untuk kaum perempuan (Daniel, 2000), pendidikan

literasi untuk para wirausahaan (Hasan & Ayande, 2014), dan pendidikan literasi untuk para orang tua (Talan, 2001) tidak akan berjalan dan mencapai hasil yang diharapkan secara optimal apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan tidak dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dari para pelaku atau aktor yang terlibat dan saling berhubungan satua sama lain di dalamnya.

Pendidikan literasi perlu memanfaatkan modal sosial (social capital) yang merupakan suatu potensi di masyarakat, selain potensi modal kapital (pendanaan), dan modal kultural. Menurut Coleman (1996) modal sosial dimaknai sebagai segala pontensi baik pontensial maupun nyata yang dihasilkan dalam proses sosial. Modal sosial terwujud dalam proses interaks sosial yang terus menerus terjadi dalam kehidupan dari pada pelakunya. Ditegaskan lebih lanjut, modal sosial berupa relasi sosial yang terjadi dan struktur relasi tersebut. Modal sosial tumbuh karena adanya relasi timbal balik yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh rasa saling percaya (trust) yang memungkinkan diperolehnya sumberdaya yang diharapkan.

Woolcock (Field. 2005) memberikan pemisahan yang berguna mengenai modal sosial, yaitu: (a) modal sosial yang mengikat (bonding), yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan literasi, proses pendidikan literasi perlu dibangun dan dilandasi perilaku saling percaya, kerja sama, berbagi informasi atau pengetahuan dalam kelompok sasaran, (b) modal sosial yang menjembatani (brigding), yang mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan sekerja; dalam hal ini, proses pendidikan literasi memberikan peluang terhadap kelompok-kelompok sasaran untuk dalam membina jaringan yang positif misal untuk saling membelajarkan atau berbagi pengalaman dengan kelompok-kelompok sasaran yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, kelompok literasi ekonomi (diwujudkan dalam kelompok wirausaha) dapat belajar kepada kelompok wirausaha lainnya; (c) modal sosial yang menghubungkan (linking),

yang menjangkau orang-orang yang berbeda pada situasi yang berbeda, seperti mereka yang sepenuhnya ada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumberdaya dari pada yang tersedia di dalam komunitas. Misalnya, kelompok sasaran pendidikan literasi ekonomi dapat berhubungan dan bermitra dengan pihak perbankan atau pihak lainnya.

Secara lebih spesifik, pendidikan literasi yang perlu dikembangkan dengan menekankan pada keberfungsian modal sosial dapat terlihat dalam kerangka teoritik di bawah. Bagan di bawah menjelaskan mengenai keberfungsian modal sosial dalam pendidikan literasi ditinjau dari proses pendidikan dan para pelaku didalamnya.

Tabel. Proses Pendidikan Literasi dan Para Pelaku

Konteks	Input	Proses	Output	Outcome
 Prioritas kebutuhan literasi Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya wan kelayakan sumberdaya manusia 	Targets group: Kesadaran Komitmen Kesiapan belajar Kurikulum: Berbasis modal sosial Pengalaman belajar bermakna Pendidik: Humanis Kompeten	Proses edukatif: Menantang, berkelanjutan, student centered	Berpsikap positif, berpengetahuan, dan berketerampilan (Manusia literate)	Peningkatan kesejahteraan material dan nonmaterial Menuju Individu atau masy. Sejahtera dan baik
	Akt	tor Dominan		
PenyelenggaraPemimpin informal dan formalWarga belajar	 Fasilitator/Pendidik Warga Belajar 	Fasilitator/ PendidikWarga Belajar	Fasilitator/ PendidikWarga BelajarPenyelenggara	Warga Belajar Penyelenggara
		Tindakan		
Membangun peta masalah/kebutuhan melalui <i>PRA, FGD,</i> <i>brainstorming,</i> analisis	Membangun kepercayaan bahwa semua orang dapat belajar	Pembelajaran dialogis humanis Partisipatoris murni	Komitmen dan fasilitasi untuk menerapkan	Sustainability literacy Networking
tugas, dsb. Membangun kepercayaan, dukungan dan komitmen	Membangun kesadaran dan komitmen belajar			learning

Pada level konteks, pendidikan literasi tidak lepas dari ketersediaan masalah dan sumberdaya dapat dimanfaatkan. Permasalahan yang pendidikan literasi yang ada sebaiknya didukung oleh kepekaan setiap warga masyarakat untuk dapat mengenali, memahami, dan mengatasi permasalahan yang ada. Para penyelenggara baik dari pemerintah maupun masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam mengkaji berbagai kebutuhan pendidikan literasi. Karena tidak mudah dalam memahami kebutuhan pendidikan literasi yang prioritas, maka diperlukan keterlibatan dari pihak terkait. Dalam hal ini partisipasi mereka harus merupakan partisipasi aktif yang ditandai dengan adanya kemitraan, berbagi wewenang, dan kontrol bersama; tidak hanya responsif atau pasif.

Salah satu pihak yang penting dan memiliki kemampuan dalam pemahaman terhadap masalah adalah pemimpin baik informal maupun formal yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks membentuk masyarakat yang literat, seorang pemimpin dapat melakukan peranan sebagai model yang mampu membangun semangat dan keinginan untuk maju; dan sekaligus ia berfungsi sebagai orang yang mampu memotivasi dan memobilisasi ke arah yang baik setiap warga masyarakat. Seorang pemimpin harus membangun sikap dan perilaku yang memposisikan dirinya sebagai teman, pelayan, dan pendamping masyarakatnya sehingga warga masyarakat akan memiliki sikap menerima dan mempercayai (trust) terhadap dirinya. Pemimpin sebagaimana dalam Kotter bahwa ia harus berperilaku sebagai pemimpin inovatif bukan manajer untuk menuju suatu perubahan positif.

Proses pembelajaran dalam pendidikan literasi dituntut untuk terselenggara dengan dilandasi oleh nilai saling membantu, saling percaya, dan saling membelajarkan. Dengan kata lain dalam proses pembelajaran diperlukan metode pembelajaran yang edukatif yang dilandasi oleh rasa saling percaya (trust). Dewey (2004) memandang bahwa proses pendidikan yang ideal adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang

memungkinkan warga belajar merasa tertantang untuk mengembangkan dirinya. Ia memiliki kebebasan untuk mencari berbagai informasi atau pengetahuan yang sesuai minat dan bakatnya. Atau menurut istilah Dewey hal ini disebut sebagai growth. Untuk terwujudnya growth, kesadaran dan motivasi internal harus tumbuh di dalam diri warga belajar agar ia mampu mengembangkan semua potensinya. Oleh karenanya, sudah menjadi peran seorang fasilitator atau pendidik untuk dapat memfasilitasi warga belajar mencapainya sekaligus membangun motivasi internal yang kuat dan kesadaran kepada setiap warga masyarakat.

Proses pendidikan literasi perlu membahas substansi pendidikan yang berbasis modal sosial yang mungkinkan warga belajar memperoleh pengalaman belajar yang bermakna misalnya pembelajaran mengenai konfliks sosial di masyarakat, masyarakat yang multikultur, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi begitu cepat, yang mana dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran literasi. Misalnya, untuk tujuan membangun literasi teknologi, fasilitas internet dan media massa dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar. Tentunya, substansi pendidikan harus memiliki kriteria: sesuai dengan kebutuhan belajar, orientasi belajar, dan perkembangan kelompok sasaran.

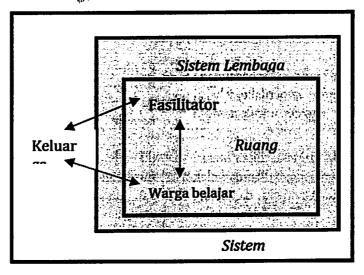
Sebagaimana halnya dengan substansi pembelajaran, pendidikan literasi perlu menggunakan metode edukatif yang mengarah pada pengembangan modal sosial. Salah satu metode adalah pembelajaran berbasis masalah (Friere, 1972) yang mana sudah banyak dikembangkan dalam dunia pendidikan. Metode ini dipandang nampaknya menjadi suatu metode yang dapat membangun rasa saling percaya antar warga belajar dengan pendidik karena dalam pembelajaran seperti ini, peran pendidik tidak sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, namun pula menjadi seorang yang dapat bersahabat dengan warga belajar sekaligus memandang mereka sebagai orang yang memiliki potensi dan keinginan.

Metode pembelajaran partisipatoris, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, action research merupakan metode pembelajaran yang nampaknya dapat digunakan dalam pendidikan literasi karena mampu mengembangkan dimensi modal sosial mencakup: kepercayaan, kerjasama, berbagi informasi dan pengetahuan, dan kohesi sosial. Hal yang mendasar dari penggunaan metode pembelajaran literasi adalah setiap orang mampu menerapkan perlaku pendidik yang warga belajar, dan warga belajar yang pendidik; dan memahami bahwa pengetahuan dihasilkan dari adanya kesepakatan bersama, bukan dari sematamata perilaku soliter.

Setelah mengikuti pendidikan literasi, suatu tindakan penguatan nampaknya menjadi solusi untuk menjamin hasil belajar literasi dapat diterapkan dalam kehidupan. Penguatan dapat dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitasi yang ditujukan agar warga belajar tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai, pengetahuan, dan ketrampilan yang telah dimilikinya seperti bimbingan rutin, layanan konsultasi belajar dan remidial. Selain memberikan fasilitasi, pendidik fasilitator perlu mengembangkan ataupun kesadaran warga belajar untuk berkomitmen menerapkan hasil belajarnya. Hal yang perlu

dikembangkan lebih penting adalah bagaimana kemampuan belajar menilai warga dikuasainya, dan menilai kebermaknaan dari hasil belajarnya.

Pada pasca pembelajaran, perlu memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aplikasi atau pemanfaatan hasil belajar literasi yang telah dikuasai oleh warga belajar. Dalam hal ini, hasil belajar perlu diwujudkan pada keberhasilan hidup dari warga belajar misalnya mereka mampu meningkatkan kegiatan ekonomi sebagai akaibat dari penerapan pengetahuan perekonomian (economic literacy), mampu membentuk perilaku yang menyenangi lingkungan hidup sebagai akibat penerapan hasil belajar mengenai lingkungan (literacy enviorenment), dan berperilaku menjadi keharmonisan sosial (social literacy). Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan belajar harus terus menerus berlangsung dimana pundimensi horizontal life long learning maka dibutuhkan berbagai kesempatan pembelajaran yang lebih menguatkan atau mengembangkan hasil belajar yang telah ada. Senge (2000, p.13) memberikan gambaran bahwa belajar terjadi pada tiga lingkungan yang membentuk jejaring belajar sebagaimana dalam gambar berikut.



Dunia

Gambar 2. Networking learning

Mendasarkan pada gambar tersebut, warga belajar yang sudah menempuh pendidikan literasi pada lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal perlu mendapatkan layanan pendidikan yang bersifat mengembangkan, menambah atau memperbaharui pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimilikinya. Oleh karenanya, lembaga apapun seperi museum, LSM, perusahaan, dperlu membuka diri untuk menampung warga belajar yang ingin mengembangan diri melalui penyediaan layanan belajar iarak jauh, layanan pembelajaran berbasis internet, dan penyedian berbagai literatur serta mengembangkan gerakan budaya membaca dan belajar. Hal yang dibutuhkan agar para pelaku tersebut dapat berperan aktif dalam penyediaan layanan belajar adalah adanya paradigma yang sama mengenai urgensi pendidikan literasi dalam mengembangkan masyarakat; dan tidak menghindari perilaku yang bersifat ego sektoral.

PENUTUP

Pencapaian tujuan yang ingin dicapai ini hanya dapat dilakukan apabila semua pihak yang berkepentingan memberikan kontribusi yang oprimal akan penyelenggaraan dan keberlanjutan pendidikan literasi. Semua pihak perlu menyadari dan membina perilaku yang didasarkan pada ikatan saling percaya, komitmen, bermitra, dan saling membagi pengetahuan bail dalam kehidupan masyarakat berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, untuk memudahkan terjadinya lingkungan yang kondusif untuk kegiatan pendidikan literasi, dan sebaliknya perlu menghilangkan perilaku yang kurang mendukung pada terselenggaranya proses pembelajaran literasi misalnya pemikiran sektoral atau egosektoral, dan partisipasi semu. Akhirnya, semua pihak perlu menyadari akan kebutuhan pengembangan pendidikan literasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, James S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94:S94-S120.
- Dale, Ann Newman, and Lenore. (2005). Sustainable development, education and literacy. *International Journal of Sustainability in Higher Education*.
 Vol. 6 No. 4, 2005, pp. 351-362, q Emerald Group Publishing Limited 1467-6370
- Daniel, Patricia . (2000). Women, literacy and power. An introduction. Equal Opportunities International, Vol. 19 Iss 2/3/4 pp.3 7
- Dewey, John. (2004). *Democracy and education*. New delhi: Aakar Books.
- Hassan, Monshood Ayinde. (2004). literacy education and attainment of sustainable livelihood in the informal sector of the Nigeria economy. Journal of educational and Social Research Vol. 4 No.3 May 2014
- Field, John. (2005). Social capital and life long learning.
 Brisboll: The Policy Press.
- Foley, Griff. (2000). Understanding Adult Education and Training. London: Allen & Unwin
- Freire, Paulo. (1972). Pedagogy of the oppressed. Victoria: Penguin Books Ltd
- Lind, Agneta. (2007).Literacy for all: Making a difference.
 Paris: Unesco
- Perry, Kristen H. (2012). What is Literacy? A Critical Overview of Sociocultural Perspectives. *Journal of Language & Literacy Education*, Volume 8 Number 1, Spring 2012 ww.joule.coe.uga.edu
- Senge, Peter (2000). Schools That Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educator, Parents, and Everyone Who Cares About Education. London: Nicholas Brealey Publishing
- Sumarno. (2009). *Pembudayaan literasi*. Jakarta: Direktorat Dikmas, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas.
- Talan, Carole. (2001), "Family literacy: an investment in the future", *The Bottom Line*, Vol. 14 lss 1 pp. 12 18